

***E-Government* Kependudukan Indonesia: Pengembangan Instrumen dan Evaluasi *Website* Kependudukan Indonesia**

E-Government of Indonesian Demographic: Development Instrument and Evaluation of Indonesian Demographic Website

INNE LARASATI, YANI NURHADRYANI*

Abstrak

Indonesia menduduki posisi ke-4 sebagai negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia. Oleh karena itu data statistik kependudukan sangatlah penting bagi pemerintah dan organisasi dalam merumuskan pembangunan dan bagi masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas. Selayaknya data statistik kependudukan mudah diakses, *up-to-date* dan disajikan dalam berbagai bentuk yang informatif misalnya melalui *website*. Dengan *website* masyarakat/organisasi dapat mengakses informasi dan melakukan transaksi data kependudukan seperti registrasi kelahiran, kematian, pernikahan/perceraian atau perpindahan penduduk. Seiring dengan penerapan *e-government* di Indonesia, paper ini mengevaluasi sejauh mana BPS sebagai lembaga penyedia data statistik termasuk statistik kependudukan memanfaatkan ICT terutama *website* sebagai media pelayanan publik. Evaluasi dilakukan pada *website* milik BPS di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan menggunakan instrumen kependudukan yang dikembangkan dan hasilnya dianalisis secara kuantitatif. Hasil evaluasi menunjukkan *website* hanya berfungsi sebagai penyedia informasi kependudukan yang bersifat statis, kurang informatif dan belum memiliki layanan *online* seperti transaksi data kependudukan sehingga masyarakat masih harus mendatangi kantor pemerintahan untuk mendapatkan layanan tersebut. Kondisi *website* BPS yang masih berada pada level *web presence* ini menunjukkan bahwa implementasi *e-government* Indonesia memerlukan penanganan yang serius seperti manajemen *database* dan sistem yang lebih kompleks untuk mencapai level *interaction* dan *transaction*.

Kata kunci: *e-government*, indikator kependudukan, Indonesia, *service online*, *web presence*

Abstract

Indonesia is the 4th rank country with the biggest population in the world. Therefore demographic statistic is very important for government, organizations and citizens in variety activities. Demographic statistics should be easily accessible, *up-to-date* and presented in informative ways such as through *website*. Using *website*, user can access information and perform some online services such as demographics transactions (i.e registration of birth, death, marriage, etc). Along with the implementation of *e-government* in Indonesia, this paper evaluates to what extent does BPS (as the provider of demographic statistics) utilizes the Internet for providing public services. The evaluation conducted on BPS websites at the central, provincial and district using demographic indicators and quantitative analysis. The evaluation shows that BPS website is still at its early stage (*web presence*) with small portion of online services, so that the citizens still have to go to government offices to perform demographics transaction. This condition suggests that the implementation of *e-government* in Indonesia requires serious actions such as database management systems and more complex system in order to achieve the level of *interaction* and *transaction*.

Keywords: *demographic indicator*, *e-government*, Indonesia, *online service*, *web presence*

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2012 Indonesia merupakan negara ke-4 dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia setelah China, India, dan USA, yang tersebar di 33 provinsi (Geohive 2012). Analisis dan data kependudukan merupakan faktor penting dalam pengambilan kebijakan baik kebijakan pemerintahan maupun organisasi lainnya. Analisis kependudukan mencakup perolehan informasi dasar tentang distribusi penduduk, karakteristik, dan perubahan-perubahannya, penerangan sebab-sebab perubahan dari faktor dasar tersebut, dan penganalisaan segala konsekuensi yang mungkin terjadi di masa depan sebagai hasil dari perubahan-perubahan tersebut (Rusli 1996). Sistem informasi kependudukan adalah suatu sistem yang memberikan data statistik kependudukan di suatu negara (Kohler et al. 2002). Sistem informasi kependudukan biasanya terdiri atas dua komponen yaitu komponen yang berfungsi untuk melakukan pencatatan data kependudukan dan data vital statistik. Di masa yang akan datang diharapkan data dan analisis kependudukan Indonesia dapat diperoleh dengan mudah misalnya melalui *website*.

BPS adalah lembaga Non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden yang menangani statistik kependudukan di Indonesia yang berada di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Sesuai dengan Intruksi Presiden mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan *e-Government* (Inpres No 3/2003 dan Depkominfo 2009) dalam upaya pemanfaatan ICT (*Information and Communications Technology*) dalam menyelenggarakan pelayanan publik, BPS sudah mulai menggunakan *website* sebagai salah satu media pelayanannya. Implementasi *e-government* melalui *website* ini perlu dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana kualitas informasi yang disampaikan.

Evaluasi terhadap penerapan *e-government* telah dilakukan oleh beberapa organisasi internasional maupun nasional seperti United Nations (United nations 2003, 2004, 2005, 2008, 2010) dan Depkominfo (2004). UN melakukan evaluasi secara periodik pada lebih dari 190 negara dengan menggunakan *web measure index*. *Web measure index* memiliki 4 level, yaitu *web presence*, *interaction*, *transaction*, dan *participation* (United Nations 2010; Lee 2007; Layne 2001). Semakin tinggi index *e-government* suatu negara maka semakin tinggi kualitas layanan yang diberikan. *Webmeasure Index* Indonesia menempati urutan ke-106 pada tahun 2008 dan menurun menjadi peringkat ke-109 pada tahun 2010. UN melakukan evaluasi *website* tingkat nasional yaitu pemerintahan pusat.

Pada tahun 2010, evaluasi *website* di tingkat provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia sebanyak 429 *website* dilakukan oleh Nurhadryani (Nurhadryani 2010) yang menyatakan bahwa Indonesia masih berada dalam tahap awal yaitu *cataloging (Web Present)* dengan *online service* yang sangat terbatas. Kemudian pada tahun 2011, Nurhadryani dan Kriyar membandingkan penilaian *website* provinsi pemerintahan Indonesia dan Kamboja menggunakan *web measure index*. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua negara tersebut masih pada tahap *cataloging*, dan *website* Indonesia masih lebih baik daripada *website* pemerintahan Kamboja (Kriyar 2011). Pada tahun 2012 Ichسانی melakukan evaluasi *usability* dan *accessibility website* provinsi di Indonesia (Ichسانی 2012).

Evaluasi *e-government* termasuk evaluasi *website* pemerintahan perlu dilakukan terus menerus guna mengetahui sejauh mana pemerintahan tersebut menerapkan ICT sebagai alat untuk menyajikan layanan publik. Evaluasi *website* pemerintahan Indonesia dilakukan di tingkat nasional, provinsi dan lokal, namun belum banyaknya evaluasi pada suatu sektor tertentu atau departemen tertentu seperti pendidikan, keuangan, pertanian, kehutanan dll. Mengingat pentingnya data kependudukan maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana BPS memanfaatkan *website* sebagai media layanan statistik kependudukan.

Penelitian dilakukan dengan cara mengembangkan instrumen kependudukan kemudian dengan menggunakan instrumen tersebut dilakukan evaluasi pada *website* BPS yang mencakup evaluasi layanan/*service* apa saja yang disajikan dalam *website* BPS Indonesia. Evaluasi yang dimaksud meliputi: apakah *website* memuat informasi kependudukan dengan

lengkap dan informatif? Apakah *website* telah mampu mencatat data vital penduduk berupa pertumbuhan penduduk yang mencakup pencatatan kelahiran, kematian, pernikahan/perceraian atau perpindahan penduduk? Apakah *website* sudah menyediakan *layanan online* sehingga masyarakat tidak harus datang ke kantor pemerintahan untuk mendapatkan layanan seperti registrasi kelahiran, kematian, pernikahan atau perpindahan? Apakah *website* sudah menjadi komunikasi antara BPS dengan pemerintah, organisasi dan masyarakat lainnya? Dengan menggunakan *web measure index*, evaluasi dilakukan untuk mengetahui tahap pengembangan *website* BPS Indonesia.

METODE

Penelitian dimulai dengan mengembangkan instrumen kependudukan sebagai alat untuk mengevaluasi *website* BPS. Kemudian dengan instrumen yang dikembangkan dilakukan evaluasi *website* kependudukan BPS Indonesia yang kemudian hasilnya dianalisis.

Pengembangan Instrumen Kependudukan

Instrumen kependudukan terdiri atas variabel-variabel berupa layanan kependudukan yang harus terdapat dalam *websites* BPS. Karena belum adanya instrumen kependudukan yang standar maka variabel disusun secara subjektif dari konten yang terdapat pada *website* statistik Kanada (www.statcan.gc.ca) yang merupakan *website* kependudukan terlengkap. Setiap variabel dikelompokkan ke dalam sejumlah indikator. Instrumen lainnya yang digunakan yaitu terdiri atas variabel-variabel yang terdapat pada *web measure index* yang digunakan oleh Nurhadryani (2010) dan Kriyar (2011).

Evaluasi *Website* Kependudukan BPS Indonesia

Evaluasi dilakukan pada *website* BPS di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Sebanyak 6 provinsi yaitu Aceh, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Barat, Maluku, dan Papua, dipilih agar dapat mewakili Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Ke-6 provinsi tersebut memiliki 110 kabupaten/kota sehingga total *website* yang dipilih sebanyak 117. Evaluasi awal dilakukan dengan memeriksa apakah *website* dapat diakses atau tidak. Hasil evaluasi awal menunjukkan bahwa hanya 62 dari 117 *website* BPS yang dapat diakses. Hampir 50% BPS di tingkat kabupaten/kota memiliki alamat domain namun tidak dapat diakses (Tabel 1). Selanjutnya evaluasi hanya dilakukan terhadap 62 *website* tersebut ditambah satu *website* BPS pusat. Nama dan alamat *website* yang dievaluasi dapat dilihat pada Larasati 2012.

Evaluasi dilakukan setiap hari Sabtu, Minggu, dan Senin selama empat minggu pada tanggal 3-5, 10-12, 17-19, dan 24-26 Februari 2012. Angka-angka biner (1 dan 0) digunakan untuk menunjukkan apakah sebuah *website* menyediakan variabel-variabel yang dievaluasi berupa layanan kependudukan (1) atau tidak (0).

Analisis Hasil Evaluasi *Website* Kependudukan

Analisis dilakukan secara deskriptif melalui penyajian data dalam bentuk tabel yang berisi persentasi ketersediaan suatu variabel kependudukan pada *website* di tingkat pusat, provinsi dan daerah (kabupaten/kota).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Instrumen Kependudukan *Website* BPS Indonesia

Instrumen kependudukan yang dihasilkan terdiri atas 39 variabel yang dikelompokkan ke dalam 10 indikator (Tabel 2, kolom indikator). Indikator situs statistik kependudukan, penggunaan bahasa, berita dan informasi terbaru, alamat kontak lembaga statistik merupakan

Tabel 1 Jumlah *website* BPS yang dapat diakses pada 26 Februari 2012 provinsi Aceh, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Barat, Maluku, dan Papua

Tingkat wilayah pemerintahan	Jumlah Wilayah	Jumlah <i>website</i> yang dapat Diakses	%
Pusat	1	1	100
Provinsi	6	6	100
Kabupaten	87	45	52
Kota	23	10	43
Total	117	62	53

indikator informasi pendukung kependudukan yang harus terdapat pada *website*. Indikator visualisasi data statistik kependudukan merupakan indikator cara penyampaian data kependudukan pada *website*. Indikator data kuantitas penduduk, data pertumbuhan penduduk, data kualitas penduduk, waktu pencatatan, dan publikasi data kependudukan merupakan indikator jenis-jenis data kependudukan yang harus disampaikan pada *website*.

Instrumen *Web measure index* yang diambil dari Nurhadryani (2010) dan Kriyar (2011) terdiri atas 4 level (*web present, interaction, transaction dan participation*) dengan 18 variabel (Tabel 3, kolom variabel). Level *Web Presence* adalah level paling dasar di mana *website* harus dapat diakses, menyediakan informasi berita kependudukan, dan di-*update* secara berkala. Pada level *interaction*, selain *website* menyediakan informasi, pengguna *website* juga dapat berinteraksi dengan cara memberi komentar pada informasi tersebut, mengirim e-mail atau berdiskusi melalui forum diskusi. Pada level *transaction*, *website* mulai menyediakan layanan secara *online* misalnya masyarakat dapat melakukan transaksi data kependudukan seperti registrasi kelahiran, kematian (*birth and birth record*), perpindahan penduduk (*make new passport and renewal visa*). Transaksi data tersebut dilakukan dengan cara mengunduh, mengisi dan menggugah formulir serta melakukan pembayaran *online* jika ada biaya yang harus dibayarkan. Pada level *Participations*, masyarakat dapat berpartisipasi seperti memberikan suaranya melalui jajak pendapat atau survei lainnya. Dari *webmeasure index* Nurhadryani (2010) dan Kriyar (2011) terdapat dua variabel yang tidak digunakan pada penelitian ini, yaitu *license and permit* dan *e-voting* karena variabel tersebut kurang relevan dengan *website* kependudukan.

Hasil Evaluasi *Website* BPS Menggunakan Instrumen Kependudukan

Hasil evaluasi berupa presentasi dari indikator yang diteliti terdapat pada Tabel 2. *Indikator 1: Situs Statistik Kependudukan*. Hampir seluruh situs BPS baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota merupakan situs statistik kependudukan resmi milik pemerintah Indonesia. Sebanyak 74 % *website* memiliki tautan ke *website* sektor lainnya, adanya *link* antara *website* BPS tingkat pusat, provinsi dan kabupaten. Hal ini menunjukkan mulai adanya integrasi antar BPS pusat, provinsi dan daerah (kabupaten) walaupun hanya berupa tautan *website* saja, belum pada tahapan integrasi *database*.

Indikator 2: Penggunaan Bahasa. Situs BPS yang sudah menggunakan bahasa secara multi-lingual adalah situs BPS provinsi Bali dan 5 situs BPS tingkat kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Singkil, Ketapang, Kayong Utara, Kubu Raya, dan Seram bagian Barat. Sebagian besar (94%) *website* BPS belum menyajikan informasi dalam bahasa Inggris, beberapa *website* masih menggunakan *Google Translate* sebagai alat penerjemah. Hal ini menunjukkan bahwa informasi statistik kependudukan Indonesia belum dapat dinikmati oleh dunia Internasional.

Indikator 3: Berita dan Informasi Terbaru. *Website* menampilkan berita kependudukan yang baru, serta beberapa berita dapat diunduh. Hasil menunjukkan hampir semua *website* (98%) tidak mencantumkan tanggal terakhir *website* di-*update*. Hanya satu *website* provinsi yang mencantumkan tanggal *update*. Pada penelitian ini, rentang waktu yang digunakan adalah 30 hari sejak pengecekan dilakukan. Berita akan dinyatakan baru jika berita yang disampaikan tidak lebih dari 30 hari sejak pengecekan dilakukan, misalnya pengecekan

dilakukan tanggal 26 Januari 2012, maka berita dianggap baru jika berita tersebut tidak lebih lama dari 26 Desember 2011.

Tabel 2 Persentase jumlah *website* BPS yang menyediakan variabel-variabel kependudukan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (26 Februari 2012)

No	Indikator (variabel-variabel)	Pusat (1 <i>website</i>)	Provinsi (6 <i>website</i>)	Kab/Kota (55 <i>website</i>)	Total (62 <i>website</i>)
1	Indikator 1: Situs Statistik Kependudukan	100	92	77	79
1.a	Merupakan bagian dari situs pemerintahan	100	100	82	84
1.b	Memiliki tautan dengan situs pemerintahan lain	100	83	72	74
2	Indikator 2: Penggunaan Bahasa	100	9	4	6
2.a	Menggunakan bahasa Inggris	100	0	0	2
2.b	Menggunakan Multi-lingual	100	17	8	10
3	Indikator 3: Keterbaruan Berita dan Informasi	75	75	30	35
3.a	Memiliki informasi tanggal terakhir situs di- <i>update</i>	0	17	0	2
3.b	Memiliki berita kependudukan	100	100	62	66
3.c	Informasi dan berita merupakan yang terbaru	100	100	27	36
3.d	Informasi dan berita dapat diunduh	100	83	29	36
4	Indikator 4: Alamat Kontak Lembaga Statistik	100	100	62	67
4.a	Memiliki alamat kantor	100	100	67	71
4.b	Memiliki alamat <i>e-mail</i>	100	100	62	66
4.c	Memiliki nomor telepon dan/atau <i>fax</i>	100	100	58	63
5	Indikator 5: Visualisasi Data Statistik				
	Kependudukan	38	31	21	22
5.a	Data kependudukan ditampilkan dalam <i>website</i>	100	100	42	48
5.b	Data yang ditampilkan dapat diatur secara dinamis oleh pengunjung situs	0	17	0	2
5.c	Data dapat diunduh dalam format Excel	100	0	0	2
5.d	Data dapat diunduh dalam format PDF	0	17	37	34
5.e	Data visual menggunakan tabel	100	100	58	63
5.f	Data visual menggunakan grafik lingkaran	0	17	11	11
5.g	Data visual menggunakan grafik batang	0	0	13	12
5.h	Data visual menggunakan grafik garis	0	0	3	3
6	Indikator 6: Data Kuantitas Penduduk	60	50	36	38
6.a	Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin	100	100	59	63
6.b	Berdasarkan kelompok umur	0	17	31	29
6.c	Berdasarkan daerah tempat tinggal	100	100	51	56
6.d	Menetap dan berpindah tempat	100	33	40	40
6.e	Berdasarkan kelompok etnis	0	0	0	0
7	Indikator 8: Data Pertumbuhan Penduduk	33	11	4	5
7.a	Jumlah penduduk berdasarkan kelahiran	0	17	9	9
7.b	Berdasarkan kematian	100	17	9	11
7.c	Berdasarkan penyebab kematian	0	0	0	0
7.e	Berdasarkan tingkat kematian bayi	100	17	3	6
7.f	Berdasarkan status perkawinan	0	17	4	5
7.g	Berdasarkan jumlah anak per keluarga	0	0	0	0
8	Indikator 9: Data Kualitas Penduduk	75	34	15	17
8.a	Jumlah penduduk berdasarkan jenis tempat tinggal	100	17	3	6
8.b	Berdasarkan pendapatan keluarga	0	0	0	0
8.c	Berdasarkan tingkat pendidikan	100	67	22	28
8.d	Berdasarkan pekerjaan	100	50	33	36
9	Indikator 10: Waktu Pencatatan	50	46	23	26
9.a	Data penduduk tercatat sejak kemerdekaan negara	0	0	0	0
9.b	Tercatat setiap bulan	0	0	0	0
9.c	Tercatat setiap tahun	100	83	46	50
9.d	Berdasarkan sensus penduduk	100	100	47	53
10	Indikator 11: Publikasi	100	67	36	40
10.a	Data kependudukan dipublikasikan kepada masyarakat	100	67	36	40
	Rata-rata (%)	62	45	26	29

Indikator 4: Alamat Kontak Lembaga Statistik. Lebih dari 50 % *website* BPS memiliki informasi kontak yang dapat dihubungi oleh pengunjung. Hal ini akan memudahkan pengunjung untuk berkomunikasi dengan kantor BPS melalui *e-mail*, telepon atau fax.

Indikator 5: Visualisasi Data Statistik Kependudukan. Visualisasi data statistik kependudukan yang digunakan masih berupa tabel tanpa analisis maupun informasi lain yang lebih detail. Pengunjung *website* tidak dapat mengatur informasi secara dinamis/sesuai kebutuhan misalnya memilih parameter yang diinginkan. Selain itu, data hanya dapat diunduh dalam format PDF. Di lain pihak data dalam format Excel kadang diperlukan untuk kepentingan lain seperti analisis data kependudukan atau ekspor data ke format lainnya.

Indikator 6: Data Kuantitas Pendudukan. Sebanyak 32% *website* sudah mulai menampilkan informasi kependudukan berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur dan daerah tempat tinggal. Namun belum ada *website* yang menampilkan informasi kependudukan berdasarkan kelompok etnis.

Indikator 7: Data Pertumbuhan Penduduk. Hanya beberapa *website* yang memiliki data pertumbuhan penduduk yaitu *website* provinsi Bali, Kabupaten Subang dan Kabupaten Indramayu. Data yang dimiliki adalah data jumlah penduduk berdasarkan kelahiran, kematian, tingkat kematian bayi, dan status perkawinan. Hasil ini tidak mencapai 10%, padahal data pertumbuhan penduduk termasuk data yang penting untuk melihat perkembangan penduduk di suatu daerah. Perkembangan penduduk dapat direkam melalui sistem informasi kependudukan yang berfungsi mencatat data kependudukan dan data vital statistik. Pencatatan data kependudukan terdiri atas data kelahiran, kematian, pernikahan/perceraian dan perpindahan alamat. Keempat data tersebut terintegrasi dengan *database* vital statistik yang merupakan penyimpanan data kependudukan secara utuh.

Indikator 8: Data Kualitas Penduduk. Hasil menunjukkan bahwa *website* BPS tingkat kabupaten/kota masih belum memiliki data kualitas penduduk secara lengkap. Belum ada *website* pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang menampilkan informasi jumlah penduduk berdasarkan pendapatan keluarga sehingga pengguna tidak dapat mengetahui seberapa besar perubahan taraf hidup penduduk dari waktu ke waktu.

Indikator 9: Waktu Pencatatan. Waktu pencatatan yang ditampilkan di *website* sebagian besar hanya didasarkan pada waktu sensus penduduk yang dilakukan 10 tahun sekali. Hal ini membuat pergerakan jumlah penduduk setiap tahunnya sulit diamati. Jika setiap penduduk yang lahir dan meninggal atau berpindah tempat terekam dengan baik, informasi jumlah pertambahan penduduk setiap tahun bisa didapatkan.

Indikator 10: Publikasi. Indikator ini memberikan hasil 39%. Hal ini menunjukkan bahwa masih sedikit situs BPS tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang memberikan informasi di situs yang bersangkutan tentang publikasi buku statistik kependudukan.

Secara keseluruhan hasil menunjukkan *website* BPS Indonesia baru menyajikan 29% dari 39 variabel kependudukan yang dievaluasi, hal ini menunjukkan *website* BPS masih kurang mampu menyajikan informasi kependudukan secara informatif. *Website* BPS pusat merupakan *website* yang paling banyak memenuhi variabel tersebut, diikuti oleh *website* BPS provinsi dan *website* BPS kabupaten/kota.

Hasil Evaluasi Website BPS menggunakan Web Measure Index

Level 1: Web Presence. Lebih dari 50 % *website* telah menyampaikan informasi mengenai “*tab about us*”, *contact information* dan *link to other official webpage*. Namun, masih sedikit situs yang memiliki konten bahasa Inggris (10 %), maupun *website* yang *update* secara berkala (10 %).

Level 2: Interaction. Belum ada *website* yang menyajikan formulir yang dapat diunduh oleh pengguna, seperti formulir registrasi atau *update* status penduduk. Untuk melakukan registrasi kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian atau pindah tempat, masyarakat masih harus mendatangi kantor BPS untuk mendapatkan formulir yang diperlukan. Berita-berita pemerintahan sudah ditampilkan, namun masyarakat belum dapat memberikan komentar dan

Tabel 3 Persentase jumlah *website* BPS yang menyediakan variabel-variabel *Web Measure index* di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota (26 Februari 2012)

No	Variabel	Pusat (1 <i>website</i>)	Provinsi (6 <i>website</i>)	Kab/Kota (55 <i>website</i>)	Total (62 <i>website</i>)
1	<i>Level : Web Presence</i>	100	76	51	55
1.a	<i>Web launching</i>	100	100	82	84
1.b	<i>Tab about us</i>	100	100	67	71
1.c	<i>Contact information</i>	100	100	71	74
1.d	<i>Link to others official webpage</i>	100	100	73	76
1.e	<i>Regular update</i>	100	50	4	10
1.f	<i>English language</i>	100	17	7	10
1.g	<i>General news and activities</i>	100	67	56	58
2	<i>Level : Interaction</i>	20	27	16	17
2.a	<i>Downloadable forms</i>	0	0	0	0
2.b	<i>Publication</i>	100	100	79	81
2.c	<i>e-mail and respond</i>	0	0	0	0
2.d	<i>Post comment</i>	0	33	2	5
2.e	<i>Online forums</i>	0	0	0	0
3	<i>Level : Transaction</i>	0	13	7	8
3.a	<i>Fill out and submit forms</i>	0	67	36	39
3.b	<i>Payment transaction</i>	0	0	0	0
3.c	<i>Make new passport</i>	0	0	0	0
3.d	<i>Renewal visa</i>	0	0	0	0
3.e	<i>Birth and death record</i>	0	0	0	0
4	<i>Level : Participation</i>	0	16	35	32
4.a	<i>Survey</i>	0	16	35	32
Rata-rata (%)		50	47	34	36

hanya dapat mengambil informasi yang sudah ada. Komunikasi baru berjalan satu arah dari BPS ke pengguna, tanpa tanggapan dari pengguna. Pada level 1 lebih dari 70% *website* menampilkan *e-mail* yang berfungsi untuk komunikasi, namun *e-mail* yang dikirimkan masih belum mendapat respon (lebih dari 2 bulan). Hal ini menunjukkan bahwa *e-mail* belum dijadikan sebagai alat komunikasi dua arah. Belum ada *website* BPS baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota yang menyediakan sarana interaksi berupa forum diskusi (0%).

Level 3: Transaction. Persentase untuk *transaction* hanya sebesar 7%. Hasil ini menunjukkan bahwa situs-situs BPS tingkat provinsi dan kabupaten/kota belum dapat menyediakan sistem pelayanan masyarakat yang bersifat *online* (0%). Pelayanan yang diberikan masih bersifat *offline* sehingga masyarakat masih harus mengunjungi kantor BPS untuk mendapatkan pelayanan yang diinginkan secara langsung.

Level 4: Participation. Situs-situs BPS tingkat provinsi (16%) dan kabupaten/kota (34%) sudah mulai menyediakan *polling* sederhana. Contoh *polling* yang tersedia adalah seberapa baik pelayanan BPS di tahun sebelumnya dan bidang/konten apa yang harus diperbaiki. Sedangkan pada *website* pusat belum menyediakan *polling/survey* sama sekali (0%). Hal ini mengindikasikan kurangnya pengambilan pendapat masyarakat mengenai suatu isu tertentu.

Hasil evaluasi terhadap 62 *website* BPS yang dapat diakses menunjukkan bahwa sekitar 55 % *website* BPS menyajikan variabel-variabel *web presence*, hanya 17% *website* yang menyajikan fasilitas untuk berinteraksi antara *website* dan pengguna. Hanya 18% *website* yang menyediakan proses *transaction* seperti *download* dan *submit* formulir. Hanya 32% *website* yang menyajikan fungsi partisipasi masyarakat. Hasil ini akan semakin menurun jika mengikutsertakan semua *website* dari kabupaten/kota yang terpilih (117 *website*; 62 *website* dapat diakses, 55 *website* tidak dapat diakses).

Pada tahap *transaction* belum ada *website* yang menyajikan pelayanan secara *online*, sulitnya pencapaian pada level *transaction* ini karena perlu dibangun komunikasi data dan manajemen data yang kompleks. *Online service* merupakan suatu layanan yang seluruh prosesnya dilakukan secara *online*, mulai dari *input* data, pengiriman data (*upload* data), sampai proses layanan selesai. Pada *service online*, masyarakat tidak harus bertatap muka dengan penyedia layanan karena semua layanan dilakukan melalui *website*. Sebagai contoh,

dalam pembuatan akta kelahiran: masyarakat dapat mengetahui persyaratan untuk membuat akta kelahiran dari *website*, melakukan registrasi secara *online* (*input* data identitas, *upload* data yang diperlukan), mendapatkan respons dari kantor BPS mengenai status proses pembuatan akta sampai akta kelahiran tersebut tercetak.

Meskipun masih memerlukan perbaikan, hasil menunjukkan bahwa *website* pusat sudah memenuhi 50% dari variabel *web measure indeks* diikuti *website* tingkat provinsi (47%) dan kabupaten (34%), secara keseluruhan rata-rata *website* BPS memenuhi 36% variabel *webmeasure index*.

SIMPULAN

Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dari *sample* yang diambil hanya 50 % BPS Indonesia di tingkat kabupaten / kota yang mempunyai *website* yang bisa diakses. Namun, *website* tersebut baru menyajikan 29 % dari 39 variabel kependudukan. *Website* hanya dapat berfungsi sebagai penyedia informasi kependudukan yang bersifat statis, belum berfungsi sebagai penyedia service *online* seperti registrasi kelahiran, kematian, pernikahan/perceraian atau perpindahan penduduk. Masyarakat masih harus mendatangi kantor untuk proses yang berhubungan dengan kependudukan. *Website* belum dijadikan sebagai alat komunikasi antara BPS dan pengunjung.

Website BPS berada pada tahap paling awal (*web presence*). Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2010 (Nurhadryani 2010). Hal ini menunjukkan bahwa selama 2 tahun terakhir penerapan *e-government* melalui *website* di Indonesia belum memperlihatkan kemajuan yang signifikan.

Saat ini, *website* BPS dan *website* pemerintah Indonesia masih dalam tahap menampilkan informasi statis (*web presence*). Hal ini menunjukkan *e-government* Indonesia memerlukan penanganan yang serius untuk menyajikan pelayanan *online* yang memerlukan manajemen *database* dan sistem yang lebih kompleks untuk dapat mencapai level *interaction* dan *transaction*.

DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik Kab Brebes. 2012. Kegiatan sensus di Indonesia [Internet]. [diunduh 2012 Agu 31]. Tersedia pada: http://brebeskab.bps.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=265%3Akegiatan-sensus-di-indonesia-&catid=38%3Asensus&Itemid=19.
- [Depkominfo] Departemen Komunikasi dan Informatika. 2004. Kondisi situs web pemerintahan Indonesia [Internet]. [diunduh 2009 Nov 22]. Tersedia pada: <http://blogs.depkominfo.go.id/artikel/2006/01/17/kondisi-situs-web-pemerintah-daerah>.
- [Depkominfo] Departemen Komunikasi dan Informatika. 2009. Draft mengenai pelaksanaan *e-government* di instansi Pemerintah Pusat dan Daerah [Internet]. [diunduh 2009 Nov 30]. Tersedia pada: <http://pih.depkominfo.go.id/?cat=10&paged=4>.
- Geohive. 2012. Population statistics [Internet]. [diunduh 2012 Apr 8]. Tersedia pada: <http://www.geohive.com>.
- Ichsani Y. 2012. Pengembangan *framework* untuk mengukur *usability* dan *accsesibility* pada situs-situs web *e-government* provinsi di Indonesia [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Kohler I, Kaltchev J, Dimova M. 2002. Integrated information system for demographic statistics 'ESGRAON-TDS' in Bulgaria. *Demogr Res* 6:325-254.
- Kriyar E. 2011. Assessment of *e-government* in Cambodia and Indonesia by web measure index [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

- Larasati I. 2012. Pengembangan parameter situs kependudukan dan evaluasi 61 situs kependudukan pada 6 provinsi di Indonesia [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Layne K. Lee J. 2001. Developing fully functional e-government: a four stage model. *Gov Inform Q* 18:122-136.
- Lee J. 2007. Search for stage theory in e-government development. Di dalam: Griffin David, Trevor P and Halpin E, editor. *Developments in e-Government, A Critical Analysis*, Amsterdam (NL): IOS Press.
- Nurhadryani Y. 2009. Memahami konsep *e-governance* serta hubungannya dengan *e-government* dan e-demokrasi. Di dalam : *Seminar Nasional Informatika*; Yogyakarta (ID), 2009 Mei 23. Yogyakarta: UPN "Veteran" Yogyakarta. hlm F111-F117.
- Nurhadryani Y. 2010. Assessing the role of the internet in the democratization of governance: a comparative analysis of the development of e-Government in Indonesia since 1998 [disertasi]. Sendai (JP): Tohoku University.
- Rusli S. 1996. *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- United Nations. 2003. *Global e-government survey 2003* [Internet]. [diunduh 2009 Des 11]. Tersedia pada: <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan016066.pdf>.
- United Nations. 2004. *Global e-government readiness report 2004: Towards access for opportunities*. New York (US): United Nations Publ.
- United Nations. 2005. *Global e-government readiness report 2005: From e-government to e-inclusion*. New York (US): United Nations Publ.
- United Nations. 2008. *UN e-Government Survey 2008: From e-Government to Connected Governance*. New York (US): United Nations Publ.
- United Nations. 2010. Web measure model: stages of *e-government* evolution [Internet]. [diunduh pada 2012 Jun 18]. Tersedia pada: http://www2.unpan.org/egovkb/egovement_overview/webmeasure.htm.